

# **ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS KINERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH (BKPSDMD) KOTA CIMAH**

**<sup>1</sup> Cindy Wahyuni, <sup>2</sup> Euis Hernawati**

<sup>1,2</sup> Program Studi Administrasi Keuangan

<sup>1,2</sup> Politeknik Piksi Ganesha, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 301 Bandung.

E-mail: <sup>1</sup> cindywahyuni44@gmail.com; <sup>2</sup> euishernawati68@gmail.com

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine how the direct expenditure budget realization is to assess the effectiveness of performance at the Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) of Cimahi City. The research method used is descriptive qualitative method. The data used is quantitative data. The results show that the development of the level of effectiveness of the financial management of the BKPSDMD for the 2017-2020 period is increasing every year. The highest level of effectiveness occurred in 2019 with a percentage of 89.74% and the lowest level of effectiveness occurred in 2017 with a percentage of 81,83%. Overall, it is included in the criteria of being quite effective, which is having an average effectiveness ratio of above 80%. There are several obstacles that occur, namely the decline in budget realization 2020 and changes in government policies. In dealing with these obstacles, the company's efforts are made at the beginning of the budget, planning as well and optimally and conducting periodic evaluations.*

**Keywords:** Budget Realization, Effectiveness, Financial Performance

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana realisasi anggaran belanja langsung untuk menilai efektivitas kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan BKPSDMD periode 2017-2020 meningkat setiap tahunnya. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 89,74% dan tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2017 dengan persentase sebesar 81,83%. Secara keseluruhan termasuk kedalam kriteria cukup efektif, yaitu memiliki rasio efektivitas rata-rata di atas 80%. Terdapat beberapa hambatan yang terjadi yaitu menurunnya realisasi anggaran pada tahun 2020 dan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Dalam menangani hambatan tersebut upaya yang dilakukan perusahaan yaitu pada saat awal penganggaran dibuat perencanaan dengan sebaik dan seoptimal mungkin serta melakukan evaluasi berkala.

Katakunci : Realisasi Anggaran, Efektivitas, Kinerja Keuangan

## PENDAHULUAN

Perusahaan dalam melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan penyusunan anggaran yang baik demi keberlangsungan usaha suatu organisasi. Suatu program kegiatan, sangat dibutuhkan

perencanaan yang baik agar program kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan program tersebut, salah satunya yaitu dengan perencanaan anggaran. “Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial” (Mardiasmo, 2018). Anggaran memiliki peran penting sebagai sumber stabilitas, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi dan digunakan untuk menilai kinerja. Fungsi anggaran dalam pemerintahan maupun dalam sektor publik yaitu sebagai alat untuk mencapai target atau tujuan tertentu maupun sasaran yang diinginkan selama periode waktu tertentu.

Jika dilihat dari karakteristik anggaran pada sektor publik/pemerintahan dengan sektor swasta tentu memiliki perbedaan, yaitu anggaran dalam sektor publik harus dipublikasikan artinya bersifat terbuka kepada masyarakat agar dapat dievaluasi dan diperbaiki di tahun yang akan datang dan anggaran bukanlah suatu rahasia negara. Sedangkan sektor swasta anggaran bersifat tertutup untuk publik dan merupakan rahasia perusahaan. Anggaran yang dikelola oleh sektor publik harus menerapkan prinsip efektivitas yang menjadi indikator kinerja keuangan suatu entitas sektor publik. Pelaporan keuangan sektor publik adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pengguna dalam membuat dan keputusan mengenai alokasi sumber

daya yang dibutuhkan. Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi disusun berdasarkan rencana strategis yang menjadikan sebuah pedoman dalam menjalankan suatu kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam hal ini belanja dikelompokkan menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami perubahan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi merupakan nyata/pelaksanaan yang nyata. Laporan realisasi juga disebut sebagai laporan pertanggungjawaban yang harus dilakukan dan dilaporkan, melalui laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat, yang akan digunakan sebagai dasar untuk kemajuan suatu perusahaan melalui analisis efektivitas. Analisis tersebut sangat penting dilakukan karena kita bisa mengetahui apakah suatu pemerintah daerah itu telah menggunakan Anggaran Belanja Langsung secara efektif untuk mencapai target yang diharapkan. Tujuan mengukur efektivitas yaitu untuk melihat sejauh mana suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan

berdasarkan perbandingan antara realisasi belanja dan target belanja. Perbandingan ini bisa dilihat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran secara langsung antara besarnya anggaran belanja langsung dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominal.

Kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap efektivitas dalam penggunaan anggaran keuangan karena semakin efektif penggunaan anggaran dan belanja daerah, kinerja keuangan pemerintah juga akan semakin tinggi tingkat kinerjanya. Apabila efektivitas kinerja telah tercapai maka akan tercipta akuntabilitas kinerja yang merupakan suatu visi dari seluruh organisasi sektor publik. Maka dari itu efektivitas kinerja sangat penting dalam penyelenggaraan suatu organisasi untuk mengetahui sampai dimana tingkat ketercapaian tujuan sebuah organisasi tersebut. Analisis efektivitas sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja pemerintah karena dengan analisis tersebut masyarakat dapat mengetahui kondisi keuangan suatu organisasi. Pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan suatu penilaian, yaitu menilai berhasil atau tidak dalam melaksanakan program atau kegiatannya.

Pentingnya analisis pada penilaian kinerja yaitu sebagai alat bantu dalam memperoleh suatu informasi di instansi pemerintah. Oleh sebab itu mengetahui tingkat efektivitas kinerja keuangan sangat penting karena apabila realisasi anggaran tersebut tidak efektif, maka akan berpengaruh terhadap kemajuan instansi.

Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang dibahas yaitu Analisis Realisasi Anggaran Belanja Langsung Untuk Menilai Efektivitas Kinerja Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana realisasi

anggaran belanja langsung untuk menilai efektivitas kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi.

## **METODE**

“Metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data valid yang bertujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan agar dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah” (Sugiyono, 2019). Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, sebagai metode yang berfokus pada pemahaman yang mendalam, pendeskripsian, realitas sosial, dan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. (Sugiyono, 2019) menjelaskan bahwa “Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi”.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Dalam riset ini populasi yang digunakan adalah laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu non- probabilitas dengan teknik purposive sampling atau penentuan sampel dengan pertimbangan

tertentu. Kriteria yang digunakan dalam pertimbangan adalah sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi (Sugiyono, 2019). Sampel dalam riset ini adalah Realisasi Anggaran dari tahun 2017-2020 yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi.

Dalam riset ini juga pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan penelitian kepustakaan, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data menurut (Sugiyono, 2017) langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Hardani et al., 2020). Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa informasi dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, tugas akhir yang telah ada sebelumnya, yang relevan dengan judul yang diajukan. Observasi Menurut (Hardani et al., 2020). Observasi yaitu pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan cara mencari informasi, mengambil data-data yang ada di BKPSDMD.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi

berartikan mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada (Hardani et al., 2020). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian yaitu laporan keuangan tahunan yang didalamnya terdapat laporan realisasi anggaran BKPSDMD Tahun 2017-2020. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Hardani et al., 2020). Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2018). Pengukuran efektivitas menggambarkan

kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja dibandingkan dengan target anggaran belanja yang ditetapkan. Kinerja pemerintah dikatakan sangat efektif apabila kriteria efektivitas diatas 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja semakin baik dan sebaliknya semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja dengan rumus sebagai berikut: Efektivitas =

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1**  
**Kriteria**  
**Efektivitas**

Keterangan	Persentase
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	< 60%

Sumber : (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996)

Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, n.d.)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Anggaran Belanja Langsung Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi

Menurut (Halim & Kusufi, 2016) menjelaskan bahwa anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Manfaat anggaran sektor publik menurut (Nafarin, 2017) yaitu segala kegiatan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan bersama, sebagai alat untuk menilai kelebihan maupun kekurangan pegawai, memotivasi para pegawai, agar terhindar dari pemborosan dari pembayaran yang kurang perlu.

Anggaran belanja langsung di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi periode 2017-2020 dapat ditunjukkan dalam tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2**

### Data Anggaran Belanja Langsung BKPSDMD Periode

**2017-2020**

Tahun	Anggaran Belanja Langsung	Perkembangan		Ket
		Δ (Rp)	%	
2017	11.583.263.096	-	-	-
2018	8.167.314.522	(3.415.948.574)	29,490	Turun
2019	7.979.084.200	(188.230.322)	2,305	Turun
2020	2.358.936.864	(5.620.147.336)	70,436	Turun
Rata-rata	7.522.149.671			

Sumber : Data BKPSDMD diolah oleh penulis

Dilihat dari tabel diatas, perkembangan anggaran belanja langsung pada BKPSDMD Kota Cimahi selama periode penelitian mengalami penurunan setiap tahunnya, selama tahun 2017 total anggaran belanja langsung sebesar Rp 11.583.263.096. Selama tahun 2018 total anggaran belanja langsung sebesar Rp 8.167.314.522 mengalami penurunan sebesar Rp 3.415.948.574 atau turun sebesar 29,490% dibandingkan tahun 2017. Selama tahun 2019 total anggaran belanja langsung sebesar Rp 7.979.084.200 mengalami penurunan sebesar Rp 188.230.322 atau turun sebesar 2,305% dibandingkan tahun 2018. Selama tahun 2020 total anggaran belanja langsung sebesar Rp 2.358.936.864 mengalami penurunan sebesar Rp 5.620.147.336 atau turun sebesar 70,436% dibandingkan tahun 2019. Rata-rata total anggaran belanja langsung BKPSDMD periode 2017-2020 sebesar Rp 7.522.149.671. Penurunan anggaran yang sangat drastis terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp 5.620.147.336 atau turun 70,436% hal ini disebabkan karena pada saat itu masih pandemi Covid-19 sehingga adanya pengurangan belanja barang dan jasa seperti : belanja alat tulis kantor, belanja cetak, belanja penyedia jasa ujian, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja penataan arsip daerah, belanja pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas serta pengurangan

belanja modal seperti : pengadaan dan pemeliharaan mebeul kantor serta pengadaan dan pemeliharaan perlaatankantor.

### B. Realisasi Belanja Langsung di BKPSDMD

Menurut (Halkadri, 2019), laporan realisasi anggaran adalah laporan menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakain sumber daya yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Berikut ini data realisasi belanja langsung pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

(BKPSDMD) Kota Cimahi periode 2017-2020 dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3**

**Data Realisasi Belanja Langsung BKPSDMD Periode 2017-2020**

Tahun	Realisasi Belanja Langsung	Perkembangan		Ket
		Δ (Rp)	%	
2017	9.479.021.005	-	-	-
2018	6.742.083.976	(2.736.937.029)	28,874	Turun
2019	7.160.289.980	418.206.004	6,203	Naik
2020	2.028.536.009	(5.131.753.971)	71,669	Turun
Rata-rata	6.352.482.743			

Sumber : Data BKPSDMD diolah olehpenulis

Berdasarkan tabel tersebut diketahui perkembangan realisasi belanja langsung pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) dari tahun 2017-2020 mengalami naik turun atau fluktuasi.

Realisasi belanja langsung

Tahun	Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung	Efektifitas (%)	Ket	Naik/Turun (%)
2017	11.583.263.096	9.479.021.005	81,83	Cukup Efektif	0
2018	8.167.314.522	6.742.083.976	82,55	Cukup Efektif	+0,716

selama tahun 2017 total realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 9.479.021.005. Selama tahun 2018 total realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 6.742.083.976 mengalami penurunan sebesar Rp 2.736.937.029 atau turun sebesar 28,874% dibandingkan tahun 2017. Selama tahun 2019 total realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 7.160.289.980 mengalami peningkatan sebesar Rp 418.206.004 atau naik sebesar 6,203% dibandingkan tahun 2018. Selama tahun 2020 total realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 2.028.536.009 mengalami penurunan sebesar Rp 5.131.753.971 atau turun sebesar 71,669% dibandingkan tahun 2019. Rata-rata total realisasi anggaran belanja langsung BKPSDMD periode 2017- 2020 sebesar Rp 6.352.482.743.

### C. Analisis Efektivitas

Penelitian ini menggunakan pengerjaan data dengan analisis efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2018). Pengukuran efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja dibandingkan dengan target anggaran belanja yang ditetapkan. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan target anggaran belanja langsung, maka didapatkan hasil perhitungan efektivitas belanja langsung periode 2017-2020 sebagai berikut.

**Tabel 4**

**Perkembangan Tingkat Efektivitas Belanja Langsung di BKPSDMD Selama Tahun Anggaran 2017-2022**

2019	7.979.084.200	7.160.289.980	89,74	Cukup Efektif	+7,189
2020	2.358.936.864	2.028.536.009	85,99	Cukup Efektif	-3,745
Rata-rata			85,03		

Sumber : Data BKPSDMD diolah olehpenulis

tingkat efektivitas belanja langsung BKPSDMD periode 2017-2020 sebesar 85,03%.

Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 dengan persentase efektivitas sebesar 85,99% atau turun

Dari tabel hasil analisis efektivitas dapat diketahui

bahwa perkembangan tingkat efektivitas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) dari tahun 2017-2020

mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun pada tahun

2020 tingkat efektivitasnya mengalami penurunan

dikarenakan pada saat itu sedang masa pandemi Covid-19. Selama tahun 2017 memiliki tingkat

efektivitas belanja langsung sebesar 81,83%. Selama tahun 2018 tingkat efektivitas

belanja langsung sebesar 82,55% mengalami peningkatan sebesar 0,716%

dibandingkan tahun 2017. Selama tahun 2019 tingkat efektivitas

belanja langsung sebesar 89,74% mengalami peningkatan sebesar 7,189%

dibandingkan tahun 2018. Selama tahun 2020 tingkat efektivitas

belanja langsung sebesar 85,99% mengalami penurunan sebesar 3,745% dibandingkan tahun 2019.

Rata-rata belanja yaitu belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja barang dan jasa yang meliputi belanja alat tulis kantor, belanja cetak, belanja penyedia jasa ujian, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja dokumentasi dan periklanan, belanja pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, penataan arsip daerah. Belanja modal yang dikurangi seperti belanja pengadaan dan pemeliharaan meubel kantor serta belanja pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor, sehingga kinerjanya kurang optimal.

Hasil analisis efektivitas dapat disimpulkan bahwa tingkat

- 3,475% dibandingkan tahun 2019 hal ini disebabkan karena masyarakat terdampak pandemi Covid-19 sehingga adanya pengurangan

efektivitas kinerja pada BKPSDMD periode 2017- 2020 memiliki tingkat efektivitas diatas 80%, dengan nilai rata-rata tingkat efektivitas 85,03%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengelola anggaran belanja di BKPSDMD cukup efektif, yaitu tepat pada apa yang telah menjadi target anggaran serta sudah cukup baik dalam menggunakan dana, sehingga program dapat tercapai. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan. Efektivitas terkait antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya yang dicapai. Kinerja pemerintah dikatakan sangat efektif apabila kriteria efektivitas diatas 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja semakin baik dan sebaliknya semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk. Selama tahun 2017-2020 tingkat efektivitas mengalami peningkatan, dengan nilai efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu dengan nilai persentase 89,74% atau naik sebesar 7,189% dan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2017 dengan persentase 81,83%.

## SIMPULAN

1. Perkembangan tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja langsung pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi selama tahun anggaran 2017-2020 dapat dikatakan cukup efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata diatas 80%. Tingkat efektivitas pada BKPSDMD mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 89,74%

2. Tingkat efektivitas terendah

terjadi pada tahun 2017 sebesar 81,83%.

3. Penulis menyarankan untuk lebih meningkatkan tingkat efektivitasnya di tahun yang akan datang dengan melakukan perencanaan anggaran seoptimal mungkin sesuai dengan kebutuhan elemen kerja agar tercapainya target yang diharapkan dan mencapai kriteria sangat efektif, memperhatikan dan meningkatkan kinerja agar suatu program dapat dilaksanakan sebaik mungkin guna tercapainya tingkat efektivitas yang diharapkan. Serta melakukan koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga anggaran yang telah dibuat dapat terlaksana secara optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2016). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah Cetakan Kedua* (Jakarta). Salemba Empat.
- Halkadri, F. (2019). *analisis neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah*. CV IRDH.
- Hardani, Adriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. fatmi, Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cv. Pustaka Ilmu.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*. (n.d.).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntans Sektor Publik*. ANDI.
- Nafarin, M. (2017). *Penganggaran Perusahaan Edisi Ketiga*. Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. (n.d.).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. CV Alfabeta.